

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692075/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 03
Tanggal : 20 Februari 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (692075) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
- Sebesar : Rp. 1.474.002.000 (SATU MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 1.474.002.000
Rp. 1.474.002.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 1.474.002.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 1.474.002.000

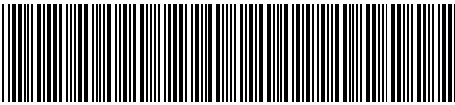
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692075/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4332-6786-4698-6000

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (692075) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

								Halaman : I A. 1	
Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					1.474.002.000	
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah					1.474.002.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:								
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya			4,00	layanan	961.449.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			4,00	layanan	961.449.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga			1,00	Perkara	30.650.000
Rincian Output	:	01	BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah			1,00	Perkara	30.650.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			4,00	Lembaga	395.760.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah			4,00	Lembaga	395.760.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			1,00	Laporan, Layanan	86.143.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah			1,00	Laporan	86.143.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692075/2026
I B. SUMBER DANA



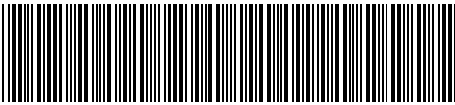
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (692075) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	1.474.002.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692075/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



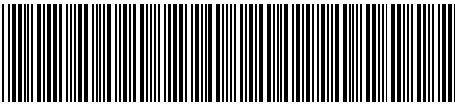
DS:4332-6786-4698-6000

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (692075) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692075	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT	-	1.474.002	-	-	-	1.474.002	33 . 01	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.474.002	-	-	-	1.474.002		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	1.474.002	-	-	-	1.474.002		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (33.01 PAPUA BARAT / KAB. MANOKWARI)	-	961.449	-	-	-	961.449		
04	PNBP	-	961.449	-	-	-	961.449		
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (33.01 PAPUA BARAT / KAB. MANOKWARI)	-	30.650	-	-	-	30.650		
04	PNBP	-	30.650	-	-	-	30.650		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (33.01 PAPUA BARAT / KAB. MANOKWARI)	-	395.760	-	-	-	395.760		
04	PNBP	-	395.760	-	-	-	395.760		
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	86.143	-	-	-	86.143	33 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692075/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



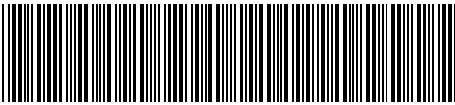
DS:4332-6786-4698-6000

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (692075) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
04	PNBP	-	86.143	-	-	-	86.143	065@	
JUMLAH		-	1.474.002	-	-	-	1.474.002		

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692075/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4332-6786-4698-6000

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (692075) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

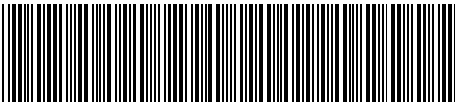
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692075	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	37.734	74.338	103.226	103.162	120.459	162.158	165.962	116.931	146.253	108.722	335.056	1.474.002
		BELANJA BARANG	0	37.734	74.338	103.226	103.162	120.459	162.158	165.962	116.931	146.253	108.722	335.056	1.474.002
		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	37.734	74.338	103.226	103.162	120.459	162.158	165.962	116.931	146.253	108.722	335.056	1.474.002
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	37.734	74.338	103.226	103.162	120.459	162.158	165.962	116.931	146.253	108.722	335.056	1.474.002
								</							

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692075/2026
IV A. B L O K I R

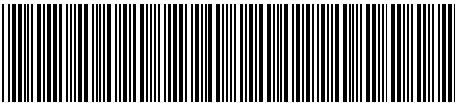


DS:4332-6786-4698-6000

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692075] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692075	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 577.726	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 577.726	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 144.496
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 81.340		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.240
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 49.054
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.800	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.745
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522141	Belanja Sewa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.615	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.056
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.400	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.050
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 37.451		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692075/2026
IV A. B L O K I R



DS:4332-6786-4698-6000

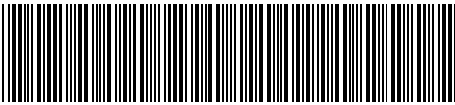
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692075] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.891		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.625
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 131.200		
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.441		
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		
7110.FAE	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.470		
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.520		
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.698		
	Prioritas Direktif Presiden TA 2026		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.234		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692075/2026
IV B. C A T A T A N



DS:4332-6786-4698-6000

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692075] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO